SKRIPSI

REVITALISASI KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Jurusan Sosiologi
Program Studi Pembangunan Sosial

Oleh :

Aurelia Falda
Nim. E1022221014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

SKRIPSI

REVITALISASI KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Jurusan Sosiologi

Program Studi Pembangunan Sosial

Oleh :

Aurelia Falda

NIM. E1022221014

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

REVITALISASI KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Aurelia Falda
NIM. E1022221014

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Drs. M. Sabran Achyar, M.Si
NIP.196207091990021001

Tanggal: 20 Mei 2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Nurwijayanto, SH, M. Si
NIP.196708182007011002

Tanggal: 11 Mei 2026

HALAMAN PENGESAHAN

REVITALISASI KELEMBAGAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PAK LAHENG KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh :
Aurelia Falda
Nim. E1022221014

Dipertahankan Di : Pontianak

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 24-06-2026

Waktu : 15:00 Wib

Tempat : Ruang Sidang S1

Tim Penguji

Ketua

Drs. M Sabran Achyar,M.Si
NIP. 196207091990021001

Sekretaris

Nurwijayanto, S.H., M.Si
NIP. 196708182007011002

Penguji Utama

Dr. H Agus Sikwan, SH, M.Hum
NIP. 196108081987031006

Penguji Pendamping

Reiki Nauli Harahap, MA
NIP. 199411012022031008

Disahkan Oleh :

Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Aurelia Falda (E1022221014): Revitalisasi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. **Skripsi. Program Studi Pembangunan Sosial, Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak 2026.**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan Pemahaman mengenai Revitalisasi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD, seperti kurangnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa, rendahnya pemahaman anggota terhadap peraturan yang berlaku, serta minimnya partisipasi anggota dalam kegiatan rapat dan musyawarah desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum Desa Pak Laheng. Teori yang digunakaan pada penelitian ini yaitu teori penguatan kelembagaan menurut Grindle yang mencakup tiga dimensi, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan manajemen, dan penguatan institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kelembagaan BPD Desa Pak Laheng secara umum sudah berjalan cukup baik. BPD telah menjalin sinergi yang harmonis dengan pemerintah desa dalam proses penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes, serta aktif terlibat dalam pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan dan penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan bantuan pupuk. Namun demikian, masih ditemukan beberapa hambatan, di antaranya lemahnya kapasitas administrasi anggota BPD yang masih menyampaikan laporan pengawasan secara lisan, kurangnya partisipasi sebagian anggota dalam rapat akibat kesibukan pekerjaan, serta belum tersedianya ruang sekretariat BPD yang mandiri sehingga menghambat efektivitas kerja lembaga. Oleh karna itu diperlukan upaya penguatan yang lebih serius melalui pelatihan teknis bagi anggota BPD, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai khususnya kantor sekretariat tersendiri, serta peningkatan pola kemitraan dan komunikasi yang lebih proaktif antara BPD dan pemerintah desa agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Desa Pak Laheng.

Kata Kunci : Revitalisasi, Kelembagaan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perencanaan Pembangunan, Desa Pak Laheng.

ABSTRACT

Aurelia Falda (E1022221014): Revitalizing the Institutional Capacity of the Village Consultative Body in Development Planning in Pak Laheng Village at Toho District of Mempawah Regency. **Undergraduate Thesis of Social Development Study Program in Faculty of Social and Political Sciences at Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2026.**

This undergraduate thesis aims to provide an in-depth understanding of the revitalization of the institutional capacity of the Village Consultative Body (*Badan Permusyawaratan Desa/BPD*) in the development planning process in Pak Laheng Village at Toho District of Mempawah Regency. The study was motivated by several challenges affecting the implementation of the BPD's functions, including inadequate coordination between the BPD and the village government, limited understanding of applicable regulations among BPD members, and low participation of members in village meetings and deliberative forums. This research employed a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, the Chairperson and members of the BPD, community leaders, and residents of Pak Laheng Village. The study adopted Grindle's institutional strengthening theory, which comprises three dimensions: human resource development, management strengthening, and institutional strengthening. The findings indicate that the institutional revitalization of the BPD in Pak Laheng Village has generally been implemented effectively. The BPD has established a harmonious partnership with the village government in formulating the Village Medium-Term Development Plan (*RPJMDes*), the Village Government Work Plan (*RKPDes*), and the Village Revenue and Expenditure Budget (*APBDes*). In addition, the BPD has actively participated in monitoring development projects and the distribution of social assistance programs, including Direct Cash Assistance (*BLT*) and fertilizer subsidies. Nevertheless, several challenges remain, including the limited administrative capacity of BPD members, who continue to submit monitoring reports verbally rather than in written form, the low participation of some members in meetings due to work commitments, and the absence of an independent BPD secretariat office, which constrains the institution's operational effectiveness. Therefore, greater institutional strengthening is required through technical training for BPD members, the provision of adequate facilities and infrastructure, particularly a dedicated secretariat office, and the enhancement of more proactive partnerships and communication between the BPD and the village government. These efforts are expected to ensure that the development planning process is implemented more effectively, transparently, and in a manner that better reflects the interests of the community in Pak Laheng Village.

Keywords: Revitalization, Institutional Capacity, Village Consultative Body (BPD), Development Planning, Pak Laheng Village

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Revitalisasi Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah." Penelitian ini berfokus pada munculnya dari kenyataan di lapangan bahwa meskipun BPD sudah terbentuk dan berjalan, masih ditemukan sejumlah masalah yang menghambat fungsinya secara optimal, yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPD dengan pemerintah desa, minimnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas pokok dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta rendahnya partisipasi sebagian anggota dalam kegiatan rapat dan musyawarah desa. Selain itu, BPD juga belum memiliki ruang sekretariat sendiri sehingga kegiatan administrasi dan rapat internal seringkali dilakukan di rumah pribadi anggota atau menumpang di kantor kepala desa.

Kondisi ini menyebabkan laporan pengawasan masih disampaikan secara lisan dan belum memenuhi standar administrasi yang semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal pokok, yaitu pertama, bagaimana proses revitalisasi kelembagaan BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Pak Laheng berlangsung. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala dalam koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD. Ketiga, menganalisis sejauh mana pemahaman fungsi BPD mempengaruhi efektivitas revitalisasi kelembagaan dalam mendukung perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan tepat sasaran.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakaan oleh penulis yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, serta masyarakat umum Desa Pak Laheng.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa revitalisasi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dapat diuraikan melalui tiga dimensi teori penguatan kelembagaan menurut Grindle sebagai berikut.

Pertama, dari sisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa menunjukkan bahwa anggota BPD Desa Pak Laheng memiliki keberanian dalam menyuarakan aspirasi di lapangan dan sinergi antara BPD dengan pemerintah desa sudah mulai terbangun dengan baik, terutama dalam pembahasan APBDes dan rancangan pembangunan. Namun demikian, masih ditemukan kelemahan pada aspek keterampilan teknis dan administrasi, di mana laporan hasil pengawasan masih disampaikan secara lisan dan belum memenuhi standar administrasi yang semestinya. Selain itu, beberapa anggota BPD masih minim pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta jarang menghadiri rapat pembahasan rencana pembangunan karena kesibukan pekerjaan masing-masing.

Kedua, dari sisi Penguatan Manajemen, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana operasional BPD sebesar Rp 50 juta yang bersumber dari APBDes sudah dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan BPD, mencakup biaya rapat, perjalanan dinas, pengadaan seragam, dan alat tulis kantor. BPD juga telah dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes bersama pemerintah desa. Fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan proyek pembangunan juga mulai tampak nyata, di mana anggota BPD terlibat langsung dalam monitoring proyek pembangunan jembatan, jalan usaha tani, serta pengawasan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pupuk kepada masyarakat. Meskipun demikian, pengelolaan administrasi dan pengarsipan dokumen BPD masih belum tertib karena belum memiliki ruang sekretariat sendiri, sehingga arsip BPD kerap bercampur dengan dokumen desa.

Ketiga, dari sisi Penguatan Institusi, hasil wawancara dengan Ketua BPD Bapak Suhardi Mangkeh mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi lembaga adalah kurangnya partisipasi anggota dalam menghadiri rapat, meskipun sebelumnya sudah diinformasikan melalui grup komunikasi BPD. Selain itu, BPD Desa Pak Laheng hingga saat ini belum memiliki ruang sekretariat yang mandiri dan masih bergabung dengan kantor kepala desa, yang berdampak pada kurang aktifnya anggota dalam berkantor secara rutin. Kondisi ini menyebabkan rapat internal BPD kerap dilaksanakan di rumah pribadi anggota. Sementara itu, tokoh masyarakat Bapak Suryanto Kumis menyoroti bahwa BPD masih cenderung menunggu usulan dari bawah tanpa memiliki agenda dan target kerja tahunan yang

mandiri, serta fungsi dan tugas pokok BPD dinilai belum cukup transparan kepada masyarakat.

Saran untuk penelitian ini agar pemerintah daerah maupun pemerintah desa lebih serius dalam meningkatkan kemampuan anggota BPD melalui pelatihan rutin, baik secara online maupun offline, terutama terkait tugas dan fungsi BPD berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Penyediaan kantor sekretariat BPD yang mandiri juga perlu segera diwujudkan agar administrasi lebih tertib dan anggota lebih aktif. Selain itu, BPD diharapkan lebih proaktif dengan memiliki rencana kerja yang jelas dan tidak sekadar menunggu usulan dari masyarakat, termasuk melakukan studi banding ke desa-desa yang lebih maju guna menggali potensi lokal demi pembangunan Desa Pak Laheng yang lebih maju dan sejahtera.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Aurelia Falda

Nomor Mahasiswa : E1022221014

Program Studi : Pembangunan Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manpun. Sumber yang saya gunakan dalam penelitian skripsi ini telah saya cantumkan dalam daftar Pustaka dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Pontianak , 6 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Aurelia Falda

Nim. E1022221014

MOTTO

“ Segala Perkara Dapat Kutanggung Didalam Dia,

Yang Memberi Kekuatan Kepada Ku “

Filipi 4 : 13

“Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar, Tetapi Keberhasilan Adalah Milik Mereka Yang Senantiasa Berusaha”

(BJ Habibie)

“Seorang Anak Perempuan Pertama Hebat Dengan Seribu Mimpinya, Tidak Pantas Tenggelam Hanya Karena Keadaan”

(Aurelia falda)

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertama saya dan panutanku, bapak Petrus Supendi terimakasih atas segala pegorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah terus mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapatkan gelar.
2. Pintu surga ku dan sosok yang penulis jadikan panutan yaitu ibu Krispina Sosiati, terimakasih atas segala doa, pesan, dan harapan yang selalu mendampingi setiap Langkah dan usaha anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimaksih atas kasih sayang tanpa batas, atas kesabaran, dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan penulis. Skripsi ini ku persembahkan untuk mu.
3. Untuk saudara laki-laki saya Petrus Ray Fernandi terimaksih banyak atas dukungan secara moril atau materi yang termaksud ambil adil dalam proses perkulihan penulis sampai terselesaikanya skripsi ini, tumbuh lah lebih baik jadilah lebih baik dibanding kakamu semoga hal-hal baik selalu menyertaimu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Revitalisasi Kelembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembagunan Di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah".

Penulisan skripsi ini banyak sekali mendapat masukan, serta kritik yang membangun sehingga sangat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. M. Sabran Achyar, M.Si Selaku Pembimbing Utama, dan dosen pembimbing akademik saya dan Bapak Nurwijayanto, SH, M.Si Selaku pembimbing pendamping serta selaku koordinator program studi pembangunan sosial jurusan sosiologi yang telah meluangkan waktunya dengan tulus ikhlas serta memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat membangun bagi penulis selama proses penyusunan skirpsi ini. Selain itu, penulis juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Herlan S.Sos, M.Si Selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr.Elyta, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
3. Dr. Rupita, M.Kes selaku Wakil Dekan Bidang Umum Dan Keuangan Falkutas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Tanjungpura

4. Dr. Erdi, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
5. Dra, Syarifah Ema Rahmaniah, B.A, M.Ed selaku ketua Jurusan Sosiologi Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
6. Dra. Syarmiati, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
7. Dr. H. Agus Sikwan, SH, M.Hum selaku penguji utama yang telah meberikan masukan dan saran-saran dalam perbaikan skripsi ini.
8. Reiki Nauli Harahap, M.A selaku penguji pendamping yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam perbaikan skripsi ini.
9. Kepala Sub Bagian Akademik beserta staf yang bertugas di Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha beserta staf yang bertugas di Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
11. Bapak Hamdani selaku Kepala Desa Pak Laheng yang telah membantu penulis dalam meberikan arahan dan informasi terkait mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung.
12. Bapak Tri Agusto, S.A.P selaku sekertaris Desa Pak Laheng yang telah membantu penulis dalam meberikan arahan dan informasi terkait mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung
13. Claudia Bella. S.Pd selaku bendahara Desa Pak Laheng yang memberikan informasi terkait mengumpulkan data pada saat penelitian berlangsung

14. Bapak Suhardi Mangkeh beserta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pak Laheng yang telah memebrikan data dan informasi pendukung yang diperlukan dalam penulisan Skripsi ini.
15. Masyarakat Desa Pak Laheng Bapak Robertus, Leonardo Aldo, Suryanto Kumis yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan prodi Pembagunan Sosial reg B angkatan 2022, terimaksih selalu meberikan dukungan dan semagat untuk penulis selama masa perkuliahan, semoga segala kenagan, kebersamaaan suka dan duka dimasa perkuliahan ini suatu saat nanti akan kita kenang kebali.
17. Teman-teman Kkm The Punggur angkatan 2022 yang selalu meberikan dukungan dan semagat untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat memiliki kekurangan, oleh karenan itu penulis sangat berharap agar dapat diberikan saran dan kritikan yang konstruktif agar dapat lebih baik lagi, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembagan ilmu pengetahuan.

Pontianak, 6 Juni 2026

Aurelia Falda
Nim. E102222101

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ix**

MOTTO ..... **x**

PERSEMBAHAN ..... **xi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
- 1.1 Latar Belakang 1
- 1.2 Identifikasi Masalah 11
- 1.3 Fokus Penelitian 11
- 1.4 Rumusan Masalah 11
- 1.5 Tujuan Penelitian 12
- 1.6 Manfaat Penelitian 12
  - 1.6.1 Manfaat Teoritis 12
  - 1.6.2 Manfaat Praktis 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
- 2.1 Definisi Dan Konsep 14
  - 2.1.1 Revitalisasi 14
  - 2.1.2 Kelembagaan 15
  - 2.1.3 Badan Permusyawaratan Desa 17
  - 2.1.4 Perencanaan 19
  - 2.1.5 Pembangunan 21
- 2.2 Kajian Teori 23
  - 2.2.1 Teori penguatan kelembagaan 23
- 2.3 Hasil Penelitian Yang relevan 25
- 2.4 Kerangka Pikir 27

BAB III METODE PENELITIAN **28**
- 3.1 jenis penelitian 28
- 3.2 Langkah-Langkah Penelitian 29
- 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 30
  - 3.3.1 Lokasi Penelitian 30
  - 3.3.2 Waktu Penelitian 31

3.4 Subjek Dan Objek Penelitian 31
3.4.1 Subjek Peneitian 32
3.4.2 Objek Penelitian 33
3.5 Teknik Pengumpulan data 33
3.6 Alat Pengumpulan Data..... 35
3.7 Teknik Analisis Data 36
3.8 Teknik Keabsahan Data 38
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN 40
4.1 Keadaan Geografis Desa Pak Laheng 40
4.1.1 Letak Wilayah..... 40
4.1.2 kondisi Georafis..... 40
4.1.3 Iklim Desa Pak Laheng..... 41
4.2 Kondisi Demografi 42
4.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Usia . 42
4.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 44
4.2.3 Jumlah Pendidikan Berdasarkan Mata Pencarian Pokok . 45
4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 48
4.2.5 jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis 48
4.3 Potensi Kelmbagaan Desa 50
4.3.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pak Laheng 50
4.3.2 Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pak Laheng 52
4.3.3 Struktur Organisasi Rw Dan Rt Desa Pak Laheng 53
4.3.4 Potensi Prasarana Dan Sarana Desa Pak Laheng 55
4.4 Profil Informan 57
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 59
5.1 Proses Revitalisasi Kelembagaan Badan Permusyawarata Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Pak Laheng. Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah 59
5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Revitalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan..... 72
5.2.1 Faktor Pendukung 73
5.2.2 Faktor Penghambat 75
5.3 Analisis Teori Penguatan Kelembagaan Menurut Grindle 77
BAB VI PENUTUP 80
6.1 Kesimpulan 80
6.2 Saran..... 81
6.3 Keterbatasan Penelitian 83
DAFTAR PUSTAKA 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian anggaran APBDes Desa Pak Laheng 2024 7

Tabel 3.1 Waktu Penelitian..... 31

Tabel 4.1 Batas wilayah Desa Pak Laheng Tahun 2025..... 41

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Pak laheng Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Usia tahun 2025 43

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Pak Laheng Berdasarkan Tingkat pendidikan Tahun 2025 45

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Pak Laheng Berdasarkan Mata Pencarian Pokok Tahun 2025 47

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Pak Laheng Berdasarkan Agama Tahun 2025..... 48

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Desa Pak laheng Berdasarkan Etnis tahun 2025..... 49

Tabel 4.7 Struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa 51

Tabel 4.7 Struktur organisasi BPD Desa Pak Laheng Priode..... 53

Tabel 4.8 Struktur organisasi Rw da Rt Desa Pak Laheng..... 54

Tabel 4.9 Prasarana DiDesa Pak Laheng 55

Tabel 4.10 Sarana yang ada di Desa Pak laheng tahun 2025 56

Tabel 4.11 Profil Informan Tahun 2026 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur pikir penelitian 27

Gambar 4.2 Kantor Desa Pak Laheng 52

Gambar 5.1 Kegiatan BPD dan Pemdes duduk bersama membahas proyek pembangunan 65

Gambar 5.2 Proses Pengukuran pembangunan jembatan Dan Jalan dari tim Kabupaten, Pemdes dan BPD 65

Gambar 5.3 Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa Dengan Pemdes dalam program penyaluran bantuan BLT dan bantusn pupuk dari dinas sosial 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 90
Lamoiran 2 : Dokumentasi 94
Lampiran 3 : Surat Tugas 102
Lampiran 4 : Biotada Penulis 104

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah tindakan terencana yang diarahkan untuk melakukan perubahan tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesejahteraan dan meningkatkan mutu atau nilai individu yang menjadi aspirasi utama dalama bernegara adalah untuk mewujudkan masyarkata adil dan makmur. Otonomi daerah mempunyai kewenagan dalam mengatur dan mengurus daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang ada didaerah tersebut termaksud mengatur tentang perencanaan pembagunan yang ada didaerah tersebut guna pemerataan kesejahteraan tersebut. Dengan diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil sehingga pembangunan dapat tersebar secara merata ke seluruh pelosok daerah.

Pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh praktik pemerintahan Erop pada abab 11 dan 12 pada awal terbentuk sebuah kesatuan wilayah tersebut merupakan suatu komunitas swakelola dari kelompok penduduk dengan istilah *Municiptal* (kota), *county* (kabupaten), *communelgemente* (Desa). Pada 15 Januari 2014 Pemerintah Indonesia resmi menetapkan undang-undang No 16 Tahun 2014 tentang desa setelah melalui proses pembahasan yang cukup lama Dalam undang-undang ini, desa didefinisikan sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki wilayah dengan batas-batas tertentu dimana masyarakatnya berhak mengelola

urusan pemerintahan dan kebutuhan warganya sendiri Pengelolaan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat itu sendiri, nilai-nilai asal-usul, serta tradisi setempat yang telah diakui dan dilindungi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain memberikan definisi tersebut, berbagai aturan hukum yang berlaku juga mengatur secara jelas apa saja hak, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kesejahteraan didaerah secara tidak langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembagunan seperti pendidikan dan pertanian khususnya didesa yang tepat sasaran yang dapat menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa telah mendorong berbagai pembaruan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakyat. Desa merupakan sebuah kelompok masyarakat yang memiliki aturan hukumnya sendiri, terbentuk secara alami berdasarkan asal-usul dan tradisi yang sudah ada sejak lama sehingga bersifat khas dan unik (Irawati, n.d.) Dalam membangun pemerintahan desa, terdapat beberapa nilai dasar yang menjadi acuan, yaitu menghargai keberagaman, mendorong keterlibatan warga, menghormati kemandirian desa, menerapkan prinsip demokrasi, serta mengupayakan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentigan masyarakat Untuk mencapai pemerataan pembagunan pemerintah desa harus melibatkan warga agar mereka sadar bahwa pembagunan desa pada

dasarnya oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat Kesadaraan ini sangat penting karena akan menumbuhkan rasa memiliki yang kuat dan tanggung jawab yang tinggi terhadap segala proyek pembagunan desa. Peran masyarakat dalam proses pembagunan desa adalah salah satu bentuk nyata dari pemberdayaan masyarakat. Pengembagan masyarakat mulai tumbuh sebagai sebuah gerakan yang signifikan gerakan ini di dorong untuk meningkatkan kesadaran untuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan layanan kesejahteraan bagi orang-orang lemah dan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan (Zubaedi, M.Ag., 2013) Keterlibatan warga sangatlah penting dari setiap tahap merencanakan, melaksanakan, hingga menilai hasilnya program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah harus melalui sistem perencanaan dari bawah keatas *(Bottom- up planning).* Dengan cara ini masyarakat yang secara aktif menentukan dan merencanakaan masa depan desa itu sendiri. Sesuai dengan pasal 200 ayat 1 dalam undang-undang No32 tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemerintah ditingkat desa melibatkan dua komponen penting pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah institusi yang tergolong baru dalam struktur pemerintahan desa, khususnya sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia. Lembaga ini memiliki keanggotaan yang berasal dari perwakilan berbagai wilayah desa dan dipilih melalui mekanisme demokratis. pasal 61 ayat 2 Undang-

undang 6 Tahun 2014 Lembaga BPD berperan sebagai wadah demokrasi untuk menjalankan pemerintahan desa fungsinya menampung dan menyalurkan pendapat yang berasal dari warga desa. Pasal 1 peraturan mentri dalam negeri No. 114 Tahun 2014, perencanaan pembagunan desa adalah tahap kegiatan yang harus dilakukakn oleh pemerintah desa dan melibatkan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen masyarakat lainya secara aktif.

Lembaga Badan permusyawaratan Desa tidak akan berjalan maksimal jika lembaganya sendiri tidak kuat. Agar benar-benar bisa menjadi wakil masyarakat harus diperkuat dengan Kordinasi dan komunikasi antar pemerintah desa dan Badan Perencanaan Desa (BPD) sangat lah diperlukan hubungan antar anggota. Menurut Max Weber, organisasi formal seperti BPD bergantung pada tindakan sosial rasional untuk mencapai tujuan, tetapi tindakan tersebut dimediasi oleh interaksi sosial sehari-hari antara anggota BPD dan juga dengan Pemerintah Desa. Tujuan nya untuk mengatur pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa agar tujuan pembagunan desa dapat tercapai. Onong Uchyana (200:11), mengatakan bahwah komunikasi sebagai proses pada haikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikana). Pengembaggan kelembaggan merupakan proses untuk memperbaiki kemampuan lembaga guna mengefektifkan penggunaan sumberdaya manusia dengan ketersediaan ketersediaan dana terbata (Israel,1990). Pengembagan kelembagaan menyangkut sistem

manajemen termaksud pemantauan dan evaluasi struktur dan perubahan organisasi, perencanaan, kebijakan pengaturan staf dan personalia. Pengembaggan kelembagaan diarahkan pada efisinsi dan efektivitas lembaga yang bersifat relatif menurut lokasi, kegiatan, dan teknologi suatu lembaga.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi menurut Permendagri No. 110 tentang :

1. Membahas rancagan peraturan desa bersama kepala desa
2. Mejalankan fungsi pengawasan terhadap proses pembangunan yang berlangsung di wilayah Desa Pak Laheng
3. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
4. Mengali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Membuat panitia pemilihan kepala desa
6. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggara pemerintah desa
7. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa

Peran dan fungsi Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah dalam pembagunan yakni pembuatan perancagan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi

sebagai jalan nya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Didalam sebuah perencanaan pembagunan pasti di perlukan dana desa dalam peraturan menteri keuangan No. 201 Tahun 2022 mengenai pengelolaan keuangan Desa mengatakan bahwa desa ialah persatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan mempunyai kewenagan dalam mengatur serta untuk mengurus masalah pemerintahan, keperluan masyarakat sekitar berdasarkan gagasan masyarakat, hak sumber, maupun hak tradisional yang telah disepakati maupun dihormati didalam sistem pemerintahan NKRI. Di kabupaten Mempawah menerima alokasi dana desa dari APBN di Tahun 2025 mencapai Rp 61.543.320.000 dana tersebut akan disalurkan ke 60 desa, salah satunya di kecamatan Toho di Desa Pak Laheng sebesar Rp 801.024.000,00 Alokasi dana desa sebesar 962.804.000.00

Rincian anggaran APBDes Desa Pak Laheng 2025

Pendapatan Desa:	**Rp 1.923,294,600,00**
1. Pendapatan Transfer	Rp 1.921,794,600,00
a. Dana Desa	Rp 801,024,000,00
b. Bagi hasil pajak dan retribusidaerah	Rp 157,966,600,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp 962.804,000,00
2. Pendapatan Lain-Lain	Rp 1.500.000.00
a. Bunga Bank	Rp 1.500.000.00

Tabel 1.1

Rincian Belanja		
43 persen	Bidang Penyelenggara pemerintah desa	Rp. 809.268.320,00
28 persen	Bidang Pelaksanaan pembagunan desa	Rp 546.600.880,00
9 persen	Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa	Rp 157.966.600,00
13 persen	Bidang Pemberdayaan Masyarakat desa	Rp 235.187.584,38
7 persen	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	RP 119.606.032,00

Sumber: kantor Desa Pak Laheng 2026

Belanja Desa

1. Bidang Penyelenggara Pemerintahan desa : Rp 809.268.320.00

a. Penyelenggaraan belanja siltap , tunjangan, dan oprasional pemerintah desa : Rp 743,201,920.00

b. penyedian sarana dan prasarana pemerintahan desa : Rp 25,000,000,00

c. penyelenggaraan tata praja pemerintahaan, Perencanaan dan Keuangan Desa : Rp 41.066,400,00

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa : RP 546.600.880.00

d. Sub bidang pendidikan : Rp 110.841.703.00

e. Sub bidang kesehatan : Rp 149.738.880.00

f. Sub bidang pekerjaan Umum dan

Penataan ruang : Rp 286.020.297.00

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa : Rp 157.966.600,00

g. Sub bidang ketentraman, ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat : Rp 10.000.000.00

h. Sub bidang kebudayaan dan keagamaan : Rp 67.000.000.00

i. Sub bidang Kepemudaan dan olahraga : Rp 8.000.000.00

j. Sub bidang Kelembagaan Masyarakat : Rp 72.966.600.00

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : Rp 235. .187.584.00

k. Sub bidang pertanian dan perternakan : Rp 160.205.000.00

l. Sub bidang peneingkatan kapasitas aparatur desa : Rp 74.982.584.38

5. Bidang penangulanggan bencana darurat : Rp 119.606.032.00

m. Sub bidang penangulanggan bencana : Rp 62.006.032.00

n. Sub bidang keadaan mendesak : Rp 57.600.000.00

Dana oprasional BPD Desa Pak Laheng yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebesar 50 Juta tergantung disetiap desa yang disesuaikan dengan angaran keuangan disetiap desa. alokasi dana ini untuk menunjang pelaksanaan, tugas dan fungsi Serta wewenang badan Permusyawaratan Desa (BPD) penggunaan dana Oprasional BPD meliputi pembelian alat tulis kantor (ATK), untuk pengadaan pakaian seragam, biaya untuk perjalanan dinas yang berkaitan dengan tugas BPD, kegiatan rapat dana untuk konsumsi makan dan minum untuk kegiatan BPD dan bentuk pelaporan nya menggunakan surat pertanggung jawaban penggunaan dana desa (SPPD).

Sedangkan gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlah nya tidak bersifat tetap dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa dengan memperhatikan keuangan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam tiga fungsi utama pertama pembinaan sosial, kedua pelayanan publik, ketiga pengembaggan terhadap masyarakat sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mempunyai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Masih terdapat sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi mereka di lingkungan desa. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya kontribusi dan dukungan BPD sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah desa, khususnya dalam proses perencanaan pembangunan serta penggalian aspirasi dari masyarakat setempat.

Hal ini tampak dari sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kerap absen dalam berbagai pertemuan, baik ketika membahas rancangan maupun pembagunan, dan pelaksanaan pembagunan dan jarang turun kekantor desa akibatnya jarang tatap muka dengan kepala desa sehingga akibatnya kurang koordinasi serta tukar pikiran dengan anggota BPD dan kepala Desa jarang terjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa sibuk dengan pekerjaan yang lain. Salah satu

masalah utama juga yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa adalah keterbatasan kapasitas dan

kompetensi anggotanya. Banyak anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam, namun seringkali minim pemahaman mendalam mengenai regulasi pemerintahan desa, terutama undang-undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan mentri dalam negeri (Permendagri) terkait Badan Permusyawaratan desa (BPD) keterbatasan ini menghambat dokumen perancagan pembagunan seperti RPJMDes dan RKPDes.

Dalam perspektif Sosiologi Organisasi, BPD dapat dipandang sebagai organisasi formal di tingkat desa yang efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesehatan sistem dan kapasitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, jika BPD mengalami kendala dalam koordinasi maupun pemahaman fungsi, hal ini mengindikasikan adanya kelemahan struktural dan kapasitas kelembagaan yang harus segera diperbaiki melalui upaya revitalisasi agar organisasi BPD dapat mencapai tujuannya dalam mengawal pembangunan Menurut Margareta Mead dalam Teori Komunikasi: interaksi, juga dalam tingkatan biologis adalah salah satu perwujudan Komunikasi, karena tanpa komunikasi tindakan-tindakan kebersamaan tidak akan terjadi berdasarkan uraian diatas masih kurangnya Peran badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembagunan, seharusnya sejalan dengan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan Penyelenggara pemerintah desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana Revitalisasi Kelembagaan Badan Permusyawaratn Desa Dalam

perencanaan Pembagunan DiDesa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas yang telah di paparkan, peneliti mengindentifikasi adanya masalah yang akan dijadikan bahan penelitian bahan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi diantara kelembaggan badan permusyawaratan desa dengan pemerintahan desa
2. Kurangnya sumber daya manusia
3. Kurang mengetahui Fungsi badan Permusyawaratan Desa

1.3 Fokus penelitian

Berdasarkan hasil dari indentifikasi masalah, maka penelitian berfokus untuk membahasan “Revitalisasi Kelembagaan Badan Permusyawaratn Desa Dalam Perencanaan Pembagunan DiDesa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah”

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah penelitian dan indentifikasi masalah peneliti, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana proses revitalisasi kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembagunan di Desa Pak Laheng

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, tujuan peneliti adalah untuk menganalisis:

1. Menganalisis proses revitalisasi kelembagaan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Pak laheng
2. Menganalisis faktor yang menyebabkan kendala koordinasi kapasitas sumber daya manusia
3. Menganalisis fungsi revitalisasi kelembagaan BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat yang di peroleh dalam penelitian yang berjudul “Revitalisasi kelembagaan BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Pak Laheng Kecamatan Toho Kabupaten Mempawah" adalah sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat baca dilingkungan kampus dan menambah wawasan khususnya bagi mahasiswa Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, prodi pembagunan sosial dalam mata kuliah Masalah Sosial Dalam Pembangunan secara spesifik memberikan pemahaman mendalam bahwa kelemahan kelembagaan BPD (yang diindikasikan oleh kurangnya SDM dan

koordinasi) adalah sebuah masalah struktural sosial yang menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa yang partisipatif dan berkeadilan. serta dapat menjadi

bahan tambahan pemahaman sosial bagimana BPD bekerja dilapangan, apakah suara masyarakat benar-benar didengar dalam rencana pembagunan desa. Dapat menjadi bahan pengembagan wawasan tentang penulis serta bahan kajian yang berkenan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintahan

Dapat memberikan gambaran jelas buat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pak Laheng Menjalankan fungsinya secara optimal terutama dalam proses perencanaan pembangunan Desa. Dengan memahami kelembagaan yang efektif, desa dapat membuat perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendorong kemandirian dan kesejahteraan desa secara menyeluruh .

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu sebagai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui peneingkatan kesadaran ini masyarakat didorong untuk bisa lebih aktif dalam mengawal kebijakan publik serta memanfaatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai penyambung resmi dalam menyampaikan aspirasi pembangunan hasil dari kajian ini pada akhirnya berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar tercipta hubungan yang lebih partisipatif antara warga dan lembaga perwakilany